

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Abdul Wahab, Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik)*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Agus P., Erwan dan Dyah Ratih S. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Hessel Nogi, S. Tangkilisan. 2003. *Teori dan Konsep Kebijakan Publik (dalam Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus)*. Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI.
- Koenjoroningrat. 1991. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Putra, Darma. 2009. *Konsep Dasar, Teknik Analisis Citra dan Tahapan Membangun Aplikasi Sistem Biometrika*. Yogyakarta : Andi Publisher.
- Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bappeda. 2015. *Data Dasar Kabupaten Magetan (Basic Data of Magetan Regency)*. Magetan.

## **Sumber lain**

### **Tesis :**

Misroji. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Mengenai Depok Cyber City pada Diskominfo Kota Depok*. Program Studi Magister Ilmu Administrasi (MAP), Universitas Esa Unggul Jakarta.

### **Jurnal :**

Nico D. Mohamad. 2013. *Pelaksanaan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Berasal dari Jawa Timur dalam Otonomi Daerah (Studi Penanganan Kasus di Negara Tujuan Bekerja oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur)*. Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya. Malang.

### **Undang-Undang :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 ayat 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

### **Peraturan :**

Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman

Pelaksanaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.14/Men/X/2010 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tentang Lampiran Petunjuk Teknis Mekanisme Pelayanan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) Nomor PER- 41/KA/XI/2008.

**Internet:**

[www.siskotkln.bnp2tki.go.id/](http://www.siskotkln.bnp2tki.go.id/). Diakses pada tanggal 3 Oktober 2015 pukul 10.17 WIB.

[www.bnp2tki.go.id/frame/9003/Sejarah-Penempatan-TKI-Hingga-BNP2TKI](http://www.bnp2tki.go.id/frame/9003/Sejarah-Penempatan-TKI-Hingga-BNP2TKI). Diakses pada tanggal 3 Oktober 2015 pukul 10.17 WIB.

[www.bursakerjaabdy.com/14-disnaker-kabupatenkota-ikuti-sosialisasi-dan-pelatihan-sistem-online](http://www.bursakerjaabdy.com/14-disnaker-kabupatenkota-ikuti-sosialisasi-dan-pelatihan-sistem-online). Diakses pada tanggal 8 Oktober 2015 pukul 18.45 WIB.

[www.hukumtenagakerja.com/penempatan-dan-perlindungan-tenaga-kerja-indonesia-di-luar-negeri/](http://www.hukumtenagakerja.com/penempatan-dan-perlindungan-tenaga-kerja-indonesia-di-luar-negeri/). Diakses pada tanggal 8 Oktober 2015 pukul 19.12 WIB.

[www.afrizalwszaini.wordpress.com/2012/01/13/defenisi-kebijakan-publik-menurut-pakar](http://www.afrizalwszaini.wordpress.com/2012/01/13/defenisi-kebijakan-publik-menurut-pakar). Diakses pada tanggal 11 Oktober 2015 pukul 19.14 WIB.

[www.ojenkansil.blogspot.co.id/2014/06/kebijakan-publik-dan-implementasi](http://www.ojenkansil.blogspot.co.id/2014/06/kebijakan-publik-dan-implementasi). Diakses pada tanggal 12 Oktober 2015 pukul 08.10 WIB.

[www.arpansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-kebijakan](http://www.arpansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-kebijakan). Diakses pada tanggal 12 Oktober 2015 pukul 08.10 WIB.

[www.news.liputan6.com/read/366609/bnp2tki-kembangkan-lima-sistem-informasi](http://www.news.liputan6.com/read/366609/bnp2tki-kembangkan-lima-sistem-informasi). Diakses pada tanggal 18 Oktober 2015 pukul 15.07 WIB.

[www.magetankab.go.id](http://www.magetankab.go.id). Diakses pada tanggal 7 November 2015 pukul 19.05 WIB.